

RUANG TERBUKA PUBLIK SEBAGAI KATALISATOR INTERAKSI SOSIAL DAN KOHESI MASYARAKAT URBAN**Budi Satria¹, Dhian Tyas Untari²**¹Universitas Dian Nusantara, Jakarta – Indonesia²Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta – IndonesiaEmail : dhian.tyas@dsn.ubharajaya.ac.id**ABSTRAK**

Urbanisasi yang masif sering kali memicu fragmentasi sosial dan gaya hidup individualistis di perkotaan. Kajian literatur ini mengevaluasi peran Ruang Terbuka Publik (RTP) sebagai katalisator interaksi sosial dan kohesi masyarakat urban dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2015–2025). Menggunakan metode tinjauan literatur sistematis, kajian ini mensintesis temuan mengenai infrastruktur sosial, strategi placemaking, dan tantangan inklusivitas di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa RTP yang aksesibel dan dirancang secara partisipatif mampu meningkatkan modal sosial melalui interaksi antar kelompok yang berbeda. Namun, tantangan berupa digitalisasi dan eksklusi kelompok rentan masih menjadi hambatan utama. Kajian ini menyimpulkan bahwa aktivasi RTP melalui kegiatan kemasyarakatan yang terstruktur sangat krusial untuk memperkuat kohesi komunal. Temuan ini digunakan sebagai landasan strategis bagi kegiatan pengabdian masyarakat dalam mengoptimalkan fungsi sosial ruang terbuka guna menciptakan lingkungan urban yang lebih harmonis dan tangguh.

Kata Kunci: Ruang Terbuka Publik, Interaksi Sosial, Kohesi Masyarakat, Urbanisasi, Pengabdian Masyarakat.

PENDAHULUAN

Di era kontemporer, kota-kota besar di seluruh dunia menghadapi tekanan urbanisasi yang masif, yang sering kali mengorbankan kualitas lingkungan sosial demi pembangunan infrastruktur ekonomi. Menurut Gospodini (2018), perkembangan kawasan urban yang padat dan berorientasi pada profit telah menyebabkan fragmentasi ruang kota, di mana ruang terbuka hijau dan area komunal semakin terpinggirkan. Hal ini menciptakan fenomena "kesepian di tengah keramaian," di mana meskipun penduduk hidup berdampingan, interaksi sosial yang bermakna sangat jarang terjadi. Ruang terbuka publik (RTP) kini bukan lagi sekadar pelengkap estetika, melainkan kebutuhan mendesak untuk memulihkan koneksi antarmanusia yang mulai memudar.

Penelitian terbaru oleh Latham dan Layton (2019) menekankan bahwa infrastruktur sosial termasuk taman, alun-alun, dan trotoar—adalah elemen kunci dalam menjaga keberlangsungan kehidupan kota. Ruang-ruang ini berfungsi sebagai "katalisator" yang memungkinkan pertemuan antarstrata sosial tanpa adanya paksaan. Dalam konteks masyarakat urban yang heterogen, RTP memberikan kesempatan bagi individu dari berbagai latar belakang etnis, ekonomi, dan usia untuk saling bersinggungan secara fisik. Interaksi pasif maupun aktif di ruang terbuka dipercaya dapat mereduksi prasangka sosial dan membangun rasa kepercayaan di antara warga kota yang sebelumnya tidak saling mengenal.

Kohesi sosial di wilayah perkotaan sangat dipengaruhi oleh kualitas ruang tempat warga beraktivitas. Arouri et al. (2020) menjelaskan bahwa aksesibilitas terhadap ruang terbuka yang inklusif berkorelasi positif dengan penguatan modal sosial (social capital). Masyarakat yang aktif menggunakan ruang publik untuk kegiatan kemasyarakatan cenderung memiliki tingkat solidaritas yang lebih tinggi. Selain itu, Vujcic et al. (2019) dalam studinya menunjukkan bahwa penggunaan ruang terbuka untuk kegiatan sosial tidak hanya memperkuat ikatan komunitas, tetapi juga secara signifikan menurunkan tingkat stres dan kecemasan yang umum dialami oleh masyarakat urban akibat beban kerja dan polusi lingkungan.

Tantangan penggunaan RTP di dekade ini semakin kompleks dengan adanya digitalisasi. Mehta dan Palazzo (2020) menyoroti bahwa kehadiran teknologi digital sering kali menarik perhatian individu keluar dari ruang fisik mereka. Oleh karena itu, desain ruang terbuka masa kini dituntut untuk menjadi lebih menarik dan fungsional agar tetap relevan sebagai tempat kegiatan kemasyarakatan. Di Indonesia, tantangan ini ditambah dengan isu inklusivitas. Pratomo et al. (2021) mencatat bahwa banyak ruang publik di kota-kota besar Indonesia masih belum sepenuhnya ramah bagi kelompok rentan seperti lansia dan difabel, yang pada akhirnya membatasi partisipasi mereka dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Mempertimbangkan dinamika tersebut, kajian mengenai peran ruang terbuka publik sebagai katalisator sangat penting dilakukan. Tanpa adanya ruang yang mampu mengakomodasi kegiatan sosial secara efektif, kota akan kehilangan identitas dan kohesi sosialnya. Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana pola penggunaan ruang terbuka dapat dioptimalkan untuk memperkuat ikatan komunal di tengah arus individualisme urban yang kian kuat, serta memberikan rekomendasi bagi perencanaan kota dalam menciptakan ruang yang lebih humanis dan kolaboratif.

METODE

Kajian ini menggunakan metode Studi Kepustakaan yang bertujuan untuk mensintesis teori dan temuan empiris terkini sebagai landasan strategis kegiatan Pengabdian Masyarakat. Langkah pertama dimulai dengan identifikasi sumber pustaka dari pangkalan data akademik seperti Google Scholar, ScienceDirect, dan SINTA, dengan batasan waktu penerbitan sepuluh tahun terakhir (2015–2025). Kriteria inklusi difokuskan pada literatur yang membahas korelasi antara desain ruang publik dengan perilaku sosial masyarakat urban. Selanjutnya, dilakukan reduksi data melalui seleksi artikel yang relevan dengan variabel interaksi sosial dan kohesi komunal. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan komparatif untuk memetakan tantangan serta peluang pemanfaatan ruang terbuka di Indonesia. Hasil sintesis literatur ini kemudian ditransformasikan menjadi instrumen praktis berupa panduan pemberdayaan masyarakat. Instrumen ini akan digunakan dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat untuk mendorong partisipasi warga dalam mengaktivasi ruang terbuka sebagai pusat kegiatan kreatif dan edukatif. Dengan pendekatan ini, program pengabdian memiliki basis ilmiah yang kuat untuk menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan di lokasi sasaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Karakteristik Ruang Terbuka sebagai Ruang Ketiga (*The Third Place*)**

Berdasarkan literatur review, ditemukan bahwa Ruang Terbuka Publik (RTP) di kawasan urban berfungsi sebagai "Ruang Ketiga" sebuah zona netral antara rumah (ruang pertama) dan tempat kerja (ruang kedua). Hasil kajian menunjukkan bahwa RTP yang efektif untuk kegiatan kemasyarakatan memiliki empat dimensi utama: aksesibilitas fisik, kenyamanan lingkungan, keragaman aktivitas, dan inklusivitas sosial

Dalam konteks urban yang padat, keberadaan taman atau lapangan bukan sekadar pemenuhan koefisien hijau, melainkan infrastruktur sosial. Latham dan Layton (2019) menekankan bahwa ketika ruang publik didesain untuk mengakomodasi kegiatan spontan (seperti duduk santai) maupun terstruktur (seperti festival warga), ruang tersebut mulai mengikis batas-batas kelas ekonomi. Di Indonesia, fenomena pemanfaatan trotoar atau kolong jembatan sebagai ruang interaksi menunjukkan bahwa kebutuhan akan ruang sosial sangat tinggi, namun ketersediaan fasilitas formal sering kali tidak memadai. Hasil kajian literatur mengidentifikasi tiga tahapan bagaimana RTP mengkatalisasi interaksi sosial:

1. Interaksi Pasif (Kontak Visual): Tahap awal di mana individu merasa nyaman berada di ruang yang sama dengan orang asing. Ini membangun rasa aman dan pengakuan terhadap keberagaman (toleransi).
2. Interaksi Aktif Spontan: Terjadi melalui pemicu (*triangulation*) seperti adanya instalasi seni, taman bermain anak, atau pertunjukan jalanan yang menjadi bahan percakapan antar orang asing.
3. Interaksi Terstruktur (Kegiatan Kemasyarakatan): Penggunaan ruang untuk rapat RT/RW, senam bersama, atau pasar kaget. Tahap inilah yang secara langsung berkontribusi pada pembentukan modal sosial.

Gospodini (2018) mencatat bahwa ruang yang memiliki identitas visual yang kuat cenderung menarik lebih banyak interaksi karena menciptakan kebanggaan kolektif. Bagi kegiatan Pengabdian Masyarakat, temuan ini menyarankan bahwa aktivasi ruang harus dimulai dengan menciptakan "alasan" bagi warga untuk berhenti sejenak, bukan sekadar lewat.

Kontribusi RTP terhadap Kohesi Sosial dan Modal Sosial

Pembahasan mengenai kohesi sosial dalam literatur sepuluh tahun terakhir sangat menekankan pada konsep *bridging social capital*. Di tengah masyarakat perkotaan yang terfragmentasi ke dalam kompleks perumahan atau apartemen, RTP menjadi satu-satunya tempat di mana "pertemuan yang tidak direncanakan" dapat terjadi. Arouri et al. (2020) berpendapat bahwa interaksi di ruang terbuka meningkatkan kepercayaan interpersonal (*interpersonal trust*). Ketika warga sering bertemu di taman, muncul rasa kebersamaan yang mengurangi potensi konflik horizontal. Dalam perspektif pengabdian masyarakat, ruang terbuka harus dipandang sebagai media resolusi konflik dan ruang dialog. Jika sebuah komunitas memiliki ruang terbuka yang aktif, mereka lebih mudah dikonsolidasi untuk program-program pembangunan lingkungan lainnya, seperti pengelolaan sampah bersama atau sistem keamanan swakarsa.

Tantangan: Inklusivitas dan Tekanan Digital

Meskipun RTP memiliki potensi besar, terdapat tantangan signifikan yang ditemukan dalam literatur terbaru. Pertama adalah isu eksklusif sosial. Pratomo et al. (2021) menyoroti bahwa banyak ruang publik di Indonesia masih "eksklusif" karena tidak mempertimbangkan kebutuhan lansia atau difabel. Tanpa desain yang inklusif, RTP justru dapat mempertegas marginalisasi kelompok tertentu.

Kedua adalah distraksi digital. Mehta dan Palazzo (2020) memperingatkan bahwa penggunaan *smartphone* di ruang publik dapat menciptakan "gelembung privat" yang menghambat interaksi sosial. Pembahasan ini memberikan arah bagi pengabdian masyarakat: kegiatan yang dirancang harus bersifat interaktif secara fisik (misalnya permainan tradisional atau lokakarya seni) guna menarik warga keluar dari layar gadget mereka dan masuk kembali ke realitas sosial.

Strategi Aktivasi untuk Pengabdian Masyarakat

Sebagai landasan kegiatan pengabdian, hasil kajian menyarankan strategi Placemaking. Strategi ini bukan sekadar membangun fisik, tetapi memberdayakan masyarakat untuk "memiliki" ruang tersebut. Langkah-langkahnya meliputi:

1. Observasi Partisipatif: Mengajak warga mengidentifikasi area yang dianggap sebagai "titik mati" di lingkungan mereka.
2. Aktivasi Skala Kecil (*Lighter, Quicker, Cheaper*): Melakukan kegiatan kecil seperti pengecatan bersama atau pemasangan bangku taman sederhana untuk memicu minat warga.
3. Keberlanjutan Tata Kelola: Membentuk kelompok kerja warga yang bertanggung jawab atas jadwal kegiatan di ruang tersebut.

Ruang Terbuka Publik bukan sekadar aset fisik pemerintah, melainkan jantung kehidupan sosial masyarakat urban. Sebagai katalisator, RTP mampu mengubah lingkungan yang individualis menjadi komunitas yang kohesif melalui penyediaan wadah interaksi yang aman, inklusif, dan bermakna. Untuk kegiatan pengabdian masyarakat, fokus utama tidak boleh hanya pada aspek estetika taman, tetapi pada aktivitas yang dapat menarik warga untuk berkumpul. Keberhasilan sebuah ruang publik tidak diukur dari seberapa indahya arsitekturnya, tetapi dari seberapa banyak cerita dan interaksi yang tercipta di dalamnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur yang mendalam terhadap dinamika ruang terbuka publik (RTP) dalam satu dekade terakhir, dapat disimpulkan bahwa RTP memegang peranan vital yang tidak tergantikan dalam struktur kehidupan masyarakat urban. Di tengah arus urbanisasi yang masif dan kecenderungan pola hidup individualistis, ruang terbuka bukan sekadar elemen estetika atau paru-paru kota secara ekologis, melainkan merupakan infrastruktur sosial strategis yang berfungsi sebagai katalisator utama interaksi sosial dan perekat kohesi kemasyarakatan. Pertama, kajian ini menegaskan bahwa kualitas interaksi sosial di perkotaan sangat bergantung pada ketersediaan "ruang ketiga" yang inklusif dan aksesibel. RTP yang dirancang dengan baik mampu memfasilitasi pertemuan lintas batas (etnis, usia, dan status sosial-ekonomi) yang

jarang terjadi di ruang privat atau komersial. Interaksi ini, baik yang bersifat pasif maupun aktif, secara bertahap membangun kepercayaan interpersonal (interpersonal trust) yang menjadi fondasi bagi terciptanya masyarakat yang harmonis. Keberhasilan sebuah ruang publik tidak lagi diukur secara kuantitatif melalui luas meter perseginya, melainkan secara kualitatif melalui intensitas aktivitas kemasyarakatan yang terjadi di dalamnya.

Kedua, fenomena digitalisasi dan fragmentasi sosial di Indonesia menuntut pendekatan baru dalam pengelolaan ruang terbuka. Tantangan berupa "gelembung privat" akibat ketergantungan pada teknologi digital harus diatasi dengan strategi placemaking yang kreatif. Ruang terbuka harus mampu menawarkan pengalaman sensorik dan sosial yang tidak dapat digantikan oleh ruang virtual. Temuan literatur menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dan aktivasi ruang secara partisipatif terbukti meningkatkan rasa memiliki (sense of belonging), yang pada gilirannya akan menjamin keberlanjutan pemeliharaan ruang tersebut secara swadaya.

Ketiga, dalam konteks rencana Pengabdian Masyarakat, kajian ini memberikan landasan teori bahwa intervensi tidak boleh berhenti pada perbaikan fisik semata. Program pengabdian harus diarahkan pada aspek pemberdayaan melalui kegiatan kemasyarakatan yang terstruktur, seperti festival komunitas, lokakarya warga, atau program olahraga bersama. Langkah ini bertujuan untuk mengaktifkan kembali "titik-titik mati" di lingkungan urban menjadi pusat interaksi yang dinamis.

Optimasi ruang terbuka publik sebagai katalisator kohesi sosial merupakan langkah krusial untuk mencegah disintegrasi sosial di perkotaan. Dengan menjadikan ruang terbuka sebagai pusat kegiatan kemasyarakatan yang inklusif, kita tidak hanya membangun kota yang lebih indah secara visual, tetapi juga menciptakan ekosistem urban yang lebih manusiawi, tangguh, dan terkoneksi secara emosional antar warganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arouri, M., Nguyen, C., & Youssef, A. B. (2020). "Natural Disasters, Social Capital, and Happiness: The Case of Vietnam." *Applied Economics*, 52(15), 1634-1648.
- Gospodini, A. (2018). "Urban Design and Morphogenesis of Public Spaces in Contemporary Cities." *Journal of Urban Design*, 23(4), 512-535.
- Latham, A., & Layton, J. (2019). "Social Infrastructure and the Public Life of Cities: Studying Urban Sociality and Public Spaces." *Geography Compass*, 13(7), e12444.
- Mehta, V., & Palazzo, D. (Eds.). (2020). *The Companion to Public Space*. Routledge.
- Ngesan, M. R., & Karim, H. A. (2015). "Impact of Night Activities on Social Interaction in Urban Public Spaces." *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 201, 267-275.
- Pratomo, A., Santoso, E. B., & Setyono, J. S. (2021). "Inclusive Public Space: An Evaluation of Accessibility for People with Disabilities in Indonesia." *Journal of Regional and City Planning*, 32(1), 45-60.

Vujcic, M., Tomicevic-Dubljevic, J., Grbic, M., & Lecic-Tosevski, D. (2019). "Nature Based Solutions for Improving Mental Health and Well-being in Urban Areas." *Environmental Research*, 172, 571-576.

Zhu, J., & Fu, Y. (2022). "Public Space and Social Cohesion in High-Density Cities." *Cities*, 123, 103590.